



SIDANG DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**SIDANG PARIPURNA KE-1
TAHUN SIDANG 2024-2025**

**Saudara Presiden dan Saudara Wakil
Presiden,**

Sidang Dewan yang terhormat,

**Yang kami muliakan seluruh rakyat
Indonesia**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusional, pada Rapat Paripurna DPR RI, dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025.

Masa Persidangan ini, merupakan masa sidang yang terakhir bagi Anggota DPR RI periode 2019-2024;

Terdapat sejumlah agenda yang perlu menjadi perhatian di masa sidang ini, untuk dapat dituntaskan, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja DPR RI periode 2019-2024.

Lima tahun terakhir perjalanan kita, sebagai bangsa dan negara, seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti.

Dimulai dari Pandemi Covid 19, konflik geopolitik regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global.

Gejolak dan ketidakpastian global tersebut, berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebagai bangsa dan negara; ketahanan kesehatan, sosial, pangan, energi, ekonomi, bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun, seolah diuji.

APBN, sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat.

Penurunan penerimaan perpajakan, dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar. Sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar.

Walaupun demikian, terimakasih kami ucapkan atas gotong royong, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan; DPR RI, Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, TNI, POLRI, BUMN, Swasta, UMKM dan seluruh rakyat, perekonomian nasional berangsur pulih; hal ini patut kita syukuri bersama, karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh 5 persenan tiap tahun.

Pembangunan Nasional, walaupun disertai berbagai tantangan, telah berhasil memajukan Indonesia; khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif.

Akan tetapi, di tengah semaraknya pembangunan lahiriah ini, kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa yang memiliki integritas dan etos kerja belum dirasakan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara.

Belum dirasakan adanya perubahan cara pikir, cara kerja dan cara hidup yang dapat mempercepat kemajuan Indonesia.

***Saudara Presiden dan Saudara Wakil
Presiden, Hadirin sidang yang terhormat,***

Sesuai dengan amanat konstitusi, menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama Pemerintah untuk membentuk undang-undang.

Dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI bersama Pemerintah, harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun substansi Undang-Undang agar berisikan keberpihakan kepada rakyat, mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanpa komitmen ini, maka Undang-Undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan ketidakadilan sosial; Undang-Undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan untuk kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, dalam memastikan bahwa suatu pembentukan Undang-Undang merupakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan-kepentingan yang lebih besar; maka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan *meaningful participation*, yaitu melibatkan kalangan masyarakat yang berkepentingan dan/atau terdampak atas pengaturan oleh Undang-Undang;

DPR RI dan Pemerintah harus dapat mendengarkan suara rakyat; membuka mata dan telinga atas aspirasi rakyat secara hikmat dan bijaksana; sehingga pembentukan Undang-Undang dapat memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan tertib, memberikan perlindungan, memberikan jalan mencapai kesejahteraan, memberikan keadilan, menjaga sumber daya bangsa dan negara, dan lain sebagainya.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan Undang-Undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 Undang-Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah melalui Alat Kelengkapan DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

- Komisi 1: 8 Undang-Undang;
- Komisi 2: 80 Undang-Undang;
- Komisi 3: 5 Undang-Undang;
- Komisi 4: 1 Undang-Undang;
- Komisi 5: 1 Undang-Undang;
- Komisi 6: 5 Undang-Undang;
- Komisi 7: 1 Undang-Undang;
- Komisi 8: 1 Undang-Undang;
- Komisi 9: 1 Undang-Undang;
- Komisi 10: 4 Undang-Undang;
- Komisi 11: 5 Undang-Undang;
- Badan Legislasi: 9 Undang-Undang;
- Badan Anggaran: 1 Undang-Undang, selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Panitia Khusus DPR RI: 4 Undang-Undang.

Pada masa Persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pada pembahasan terhadap 17 RUU yang masih berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.

Salah satu agenda pembentukan Undang-Undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat I, adalah Undang Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2005-2025, diatur oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007.

Untuk periode selanjutnya, akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Keberadaan Undang-Undang ini ke depan, perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan.

Sehingga setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia.

Kita, secara kolektif, harus memiliki Politik Pembangunan Indonesia yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Nasional hendaknya memastikan bahwa usaha dan kerja keras kita dalam membangun Indonesia, memiliki arah dan tujuan bersama.

***Saudara Presiden dan Saudara Wakil
Presiden, Hadirin sidang yang terhormat,***

DPR RI, melalui fungsi pengawasan; memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat mensejahterakan rakyat, mempermudah urusan rakyat, membangun sarana prasarana untuk rakyat, menciptakan ketertiban, mewujudkan rasa aman, dan lain sebagainya.

DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain:

1. Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional;
2. Penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP);
3. Pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN);
5. Mafia tanah;
6. Perjudian *online*;
7. Korupsi tambang timah;
8. Kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN;

9. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN);
10. Subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T);
11. Alokasi kuota tambahan haji;
12. Peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan;
13. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring;
14. Kebijakan cleansing Guru Honorer; dan
15. Stabilitas nilai tukar rupiah.

DPR RI juga memberikan perhatian pada persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 yang akan datang. DPR RI akan memastikan penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya secara demokratis.

Secara khusus, DPR RI menggunakan Hak Angket atas Penyelenggaraan Haji 2024, yang banyak menimbulkan berbagai masalah pelaksanaan haji 2024;

Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Komitmen Pemerintah tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Prinsip *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara; eksekutif, legislatif dan yudikatif; telah diamanatkan di dalam konstitusi bahkan diperkuat sejak amandemen paska reformasi; kita dapat menghikmati bagaimana prinsip *check and balances* cabang-cabang kekuasaan dilaksanakan dari masa ke masa sebelum reformasi;

Prinsip *checks and balances* tersebut dapat berjalan efektif apabila kelembagaan demokrasi berada di alam yang demokratis; kehidupan demokrasi membutuhkan kelembagaan demokrasi yang sehat.

Partai politik, pemilu, kekuasaan lembaga-lembaga negara, hak-hak rakyat untuk hidup cerdas; merupakan kelembagaan demokrasi yang harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang dapat memberikan nafas kehidupan berdemokrasi; tanpa itu maka demokrasi tidak akan berjalan.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada media, wartawan dan jurnalis, yang juga telah ikut menjalankan fungsi kontrol sosial, atas penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk terhadap DPR RI.

Kepada media, rakyat juga menitipkan harapan agar dapat ikut mengawal demokrasi, mengawal jalannya kedaulatan rakyat, melalui media yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menjadi tugas sejarah kita bersama, DPR RI dan Pemerintah, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik, hidup lebih sejahtera, nyaman, mudah dalam berbagai urusan, dan negara selalu hadir untuk rakyat.

Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Hadirin sidang yang terhormat,

DPR RI, melalui tugas diplomasi, menjalankan misi dan komitmen dalam membangun dunia yang lebih baik, dunia dengan tatanan sosial, ekonomi, serta politik yang humanis, berkeadilan sosial, damai dan melestarikan sumber daya alam serta lingkungan.

Selama periode 2019 - 2024 ini DPR RI telah berperan aktif dalam forum internasional, yang ditunjukkan dengan kepemimpinan DPR RI dalam forum-forum internasional.

Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut dilakukan oleh DPR RI, untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

***Saudara Presiden dan Saudara Wakil
Presiden, Hadirin sidang yang terhormat,***

Agenda ke-2 (*dua*) pada sidang hari ini adalah Pidato Presiden RI dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya.

APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi Pemerintahan, sehingga penyusunannya juga khusus, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya; Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Pemerintahan baru; sehingga Pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya.

Oleh karena itu, di dalam Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025, DPR RI dan Pemerintah, bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun 2025;

DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangan, yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden.

Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan; memperoleh pemberdayaan ekonomi; membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat.

Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau *spending better*, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau *better to spending*.

Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari *middle income trap*.

Masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya; masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan.

Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

***Saudara Presiden dan Saudara Wakil
Presiden, Hadirin sidang yang terhormat,***

Selama 79 tahun lamanya kita telah membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan;

Menjadi momentum bagi kita semua, untuk melakukan kritik dan otokritik, atas upaya kita selama ini dalam membangun kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Tidak masalah seberapa cepat kita berjalan; asalkan kita tidak berhenti apalagi mundur.

Kita harus terus membiasakan yang benar; dan bukan membenarkan yang biasa.

Kita harus terus memperkuat hal-hal yang baik; dan membuang hal-hal yang buruk.

Dirgahayu Republik Indonesia

Sekali Merdeka... Tetap Merdeka...!

Demikian Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, atas nama Pimpinan DPR RI, kami mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan I DPR RI, Tahun Sidang 2024—2025 akan dimulai sejak hari ini, Jumat, 16 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin, tanggal 30 September 2024.